

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

#### 1. Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

*ASEAN Community* merupakan wujud dari kerjasama intra-ASEAN dalam *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali, Oktober 2003. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu pilar dari perwujudan *ASEAN Vision 2020*, bersama-sama dengan *ASEAN Security Community (ASC)* dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)* (Arifin, 2008).

Suatu komunitas negara-negara ASEAN yang sangat luas, tidak ada batasan-batasan wilayah dalam bidang perekonomian. Dimana suatu negara dapat masuk bebas dalam persaingan pasar. Masyarakat ekonomi ASEAN yang bebas dari berbagai hambatan, pengutamaan peningkatan konektivitas, pemanfaatan berbagai skema kerja sama baik intra-ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara mitra khususnya mitra FTA, serta penguatan peran pengusaha dalam proses integrasi internal ASEAN maupun dengan negara mitra.

Menurut Rizal dan Aida dalam (Arifin: 2008) pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapain pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi

yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Langkah-langkah integrasi tersebut menjadi strategis mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Pembentukan MEA juga menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi Internasional, baik dalam merespon meningkatnya kecenderungan kerja sama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, dan India.

Pencapaian MEA memerlukan implementasi langkah-langkah liberalisasi dan kerja sama, termasuk peningkatan kerja sama dan integrasi di area-area baru antara: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; konsultasi yang lebih erat di kebijakan makro ekonomi dan keuangan; kebijakan pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur, dan hubungan komunikasi; pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; integrasi industri untuk meningkatkan sumber daya regional; serta peningkatan keterlibatan sektor swasta (Arifin, 2008).

## **2. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015**

Pembentukan kawasan perdagangan bebas yang dicapai melalui mekanisme AFTA merupakan suatu keberhasilan karena tarif di kawasan telah berhasil secara bertahap diturunkan sampai dengan nol. ASEAN kemudian ingin lebih meningkatkan kerjasama ekonomi tersebut. Mengalirnya investasi asing ke

kawasan ASEAN yaitu dengan banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan membutuhkan penyalur barang (*supplier*) yang juga harus ada di kawasan sehingga terjadi efisiensi biaya produksi. Pasar ASEAN yang sudah terbuka dan menyatu dengan pasar global ditambah dengan tersedianya barang-barang produksi yang dihasilkan oleh supplier dari negara-negara ASEAN maka akan sangat membantu Negara-negara anggota ASEAN untuk semakin menarik investor asing masuk ke kawasan. Sehingga, *Cebu Declaration* pada 13 Januari 2007 (12th ASEAN Summit) memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan India (Koesrianti, 2013).

Dengan beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi; (ii) meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, *intellectual property rights*, dan peningkatan daya saing. Dengan integrasi ekonomi diharapkan infrastruktur kawasan dapat lebih berkembang bersamaan dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi (Arifin, 2008).

Untuk memperkuat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN melakukan transformasi kerja sama ekonomi dengan meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi basis komitmen negara ASEAN melalui

penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Selanjutnya, pada tahun 2008, *MEA Blue Print* mulai di implekasikan dan *ASEAN Charter* mulai berlaku pada 16 Desember 2008. Cetak biru yang merupakan arah panduan MEA dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar juga disepakati (Bustami, 2013).

Dalam rangka memantau kemajuan implementasi MEA disusun ASEAN *Baseline Report (ABR)* yang berperan sebagai *score card* melalui tiga kategori yaitu: indikator proses (*process indicators*), indikator output (*output indicators*) dan indikator hasil (*outcome indicators*) yang kemudian menjadi indeks tingkat negara dan kawasan. Indeks tingkat negara digunakan untuk perbandingan antarnegara dalam pencapaian tujuan Masyarakat ASEAN. Sementara, indeks level kawasan digunakan untuk menilai kinerja secara keseluruhan kawasan pada setiap tujuan Masyarakat ASEAN (Arifin, 2008).

Dengan suatu proses metode Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan unggul sebagai langkah dalam mengoptimalkan daya saing Indonesia di MEA dalam tujuannya Indonesia sebagai pemain. Terlihat cukup sederhana namun jika tidak dilaksanakan akan menjadi salah satu penghambat kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, pemerintah dirasa perlu mengedepankan rasa nasionalisme. Pasalnya, setiap

negara di akan melakukan hal yang sama, yakni melindungi diri agar tidak terlalu lemah menghadapi MEA tersebut.

### **3. Integrasi ekonomi**

Menurut Jovanovic dalam (Arifin: 2008) integrasi ekonomi merupakan opsi kebijakan yang lebih efisien dibanding apabila masing-masing negara melakukan upaya secara unilateral. Integrasi juga mensyaratkan paling tidak adanya beberapa pembagian tenaga kerja dan kebebasan mobilitas barang dan jasa dalam suatu kelompok negara.

#### **a) Integrasi balassa**

Kompleksitas integrasi ekonomi dan tingkatan intensitas yang berbeda mendorong munculnya analisis untuk membedakan tahapan integrasi ekonomi. Pendekatan tahapan integrasi yang digunakan secara luas adalah tahapan integrasi oleh Balassa (Arifin, 2008). Balassa membagi tahapan integrasi dalam enam tahap (Tabel 4).

**Tabel 4. Tahapan integrasi balassa**

<b>Tahapan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Preferential trading area (PTA)</i>	Blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya sama sekali.
<i>Free trade area (FTA)</i>	Suatu kawasan dimana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menetapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota.
<i>Custom union (CU)</i>	Merupakan FTA yang meniadakan hambatan –hambatan komoditi antar negara dan menetapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota.
<i>Common market (CM)</i>	Merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien.
<i>Economic union</i>	Merupakan suatu CM dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan (termasuk kebijakan struktural).
<i>Total economic integration</i>	Penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota.

Sumber: (Samsul Arifin et al. 2008)

Tahapan integrasi ini memberikan urutan untuk keperluan analisis dan membantu memahami tambahan kebijakan yang diperlukan dalam setiap tambahan integrasi apabila suatu kelompok negara ingin mencapai tahapan integrasi yang lebih tinggi.

Meski tahapan Balassa tersebut dalam perkembangannya telah mengalami penyesuaian pada berbagai hal, pendekatan ini masih tetap menjadi alat dasar

dalam studi mengenai integrasi. Secara teoritis, tahapan integrasi balassa menunjukkan bahwa semakin tinggi tahapan integrasi ekonomi, semakin kompleks persyaratan kebijakan yang diperlukan.

#### **b) Integrasi ASEAN**

Dalam lingkup ASEAN, khususnya jika dikaitkan dengan MEA sebagai salah satu bagian dari Masyarakat ASEAN (ASEAN Community), Negara-negara ASEAN belum menetapkan tingkatan integrasi yang jelas. Dalam rumusan yang disepakati oleh para kepala negara dan pemerintahan ASEAN, tujuan dari AEC adalah untuk menciptakan '*a single market and production based*'. Ini dapat diartikan sebagai integrasi penuh, kecuali dalam bidang keuangan dan moneter yang masih merupakan kewenangan negara anggota (Koesrianti, 2013).

Ada dua tingkatan integrasi regional yang dapat dipilih oleh ASEAN, seperti yang ditawarkan oleh Hew dan Soesastro, yang pertama, suatu MEA merupakan suatu "*FTA-plus*" yaitu suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan tarif nol ditambah beberapa elemen dari suatu pasar bersama, misalnya arus bebas modal dan tenaga terdidik. Pendekatan ini didasarkan pada tingginya tingkat perbedaan antara Negara-negara anggota ASEAN maka tidak mungkin diterapkan tariff tunggal bersama (*common external tariff*) seperti pada kawasan kesatuan pabean (*custom union*). Kedua, MEA sebagai suatu '*Common Market-Minus*' yaitu suatu bentuk akhir integrasi ekonomi ASEAN

pada 2015 adalah berupa pasar bersama dengan menetapkan suatu bidang tertentu sebagai integrasi yang lebih dalam dengan waktu yang lebih lama dan tidak ada pengecualian. Ini merupakan *common market* dengan pengecualian yang disepakati bersama (Hew dan Soesastro, 2003)

#### **4. MEA dan tahapan integrasi ekonomi**

Menindaklanjuti Visi ASEAN 2020, para pemimpin ASEAN telah mendeklarasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai tujuan akhir integrasi ekonomi regional ASEAN. Sebagai bentuk komitmen tersebut, negara anggota ASEAN setuju untuk mengimplementasikan MEA pada 2015 dan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi serta menciptakan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang kompetitif, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dari kondisi ini, terdapat dua pertanyaan penting. *Pertama*, bagaimana bentuk akhir MEA apabila dikaitkan dengan tipe integrasi Balassa. *Kedua*, bagaimana ASEAN mencapai MEA tersebut (Arifin, 2008).

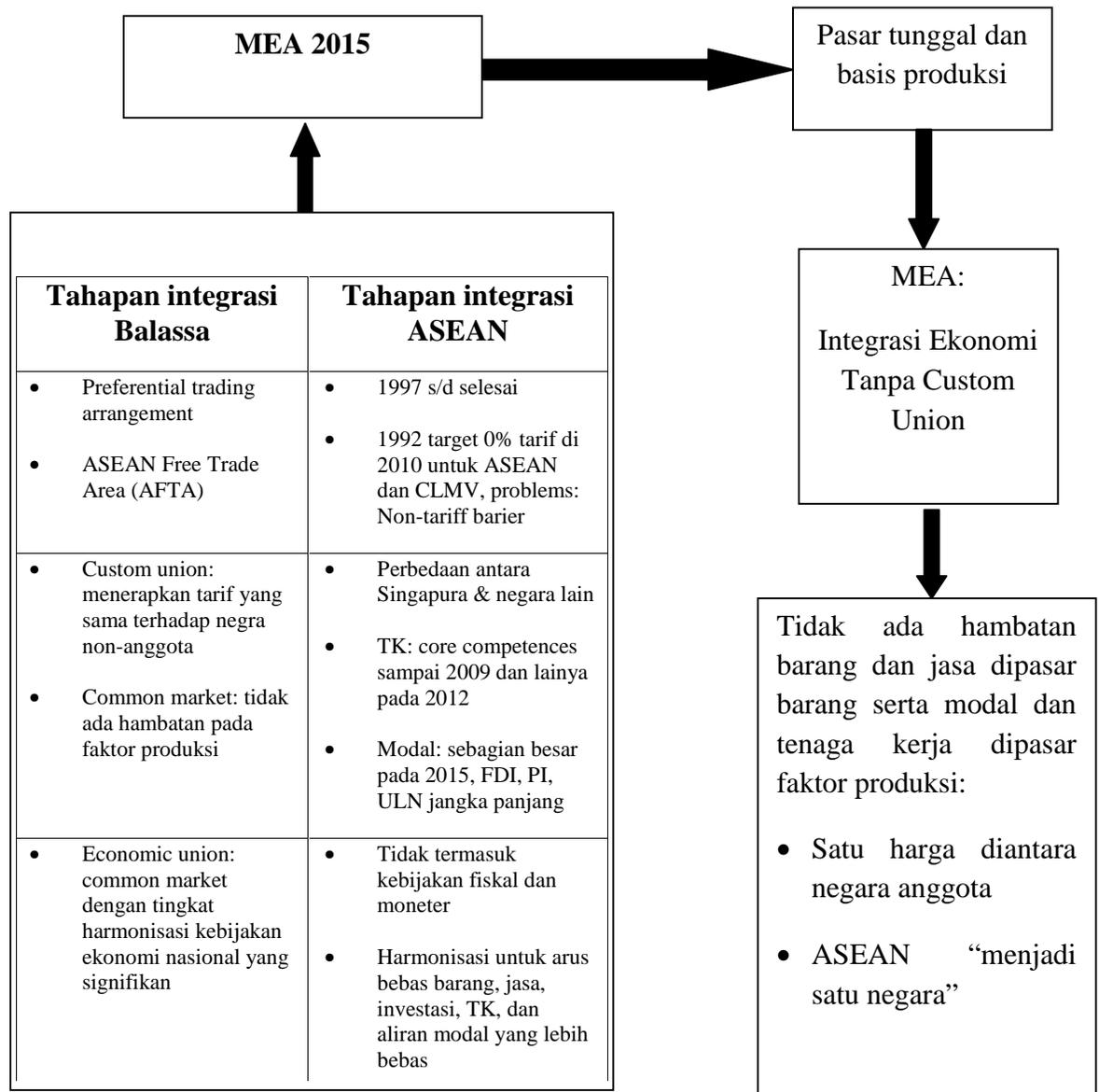
Harmonisasi kebijakan tersebut antara lain tercermin dalam ASEAN *Single Window* (ASW) dalam rangka memfasilitasi perdagangan, kebijakan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk memfasilitasi proses liberalisasi jasa dan tenaga kerja serta adanya upaya harmonisasi standar dipasar modal. Selain upaya tersebut untuk mendorong terjadinya aliran bebas barang dan jasa di ASEAN, anggota ASEAN secara bersama-sama juga menerapkan langkah dan

kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi hambatan non-tarif (*Non-Tariff Barriers-NTBs*).

Diawali pembentukan PTA (1997) dan AFTA (1992), ASEAN melakukan lompatan menuju penyatuan ekonomi tanpa mengikuti tahapan integrasi Balassa secara berurutan. Hal menarik dalam proses tersebut adalah ASEAN tidak akan melalui salah satu tahapan penting integrasi Balassa yaitu *Custom Union*, hal ini ditandai dengan tidak adanya kebijakan *Common External Tariff* yang diberlakukan di ASEAN terhadap negara bukan anggota ASEAN. Adanya berbagai kesepakatan bilateral antara anggota ASEAN dengan negara diluar ASEAN justru menerapkan skema tarif yang berbeda satu sama lain di negara-negara diluar ASEAN. Selain itu, cetak biru MEA yang menggambarkan *road map* menuju pasar tunggal basis produksi, juga tidak memasukan CET dalam proses integrasi tersebut (Arifin, 2008).

Selain melakukan lompatan dalam menuju penyatuan ekonomi, dengan melihat *strategic schedule* MEA, proses penyatuan ekonomi ASEAN 2015 ditandai pula dengan upaya mencapai sebagian karakteristik dalam *customs union* maupun karakteristik *common market* serta *economic union* secara bersamaan dan dilakukan secara bertahap dimulai pada tahun 2008 hingga 2015. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses integrasi ASEAN menuju penyatuan ekonomi tidak sepenuhnya mengikuti tahapan integrasi Balassa secara kaku. ASEAN dalam hal ini menempuh pola yang berbeda dari tahapan

Balassa, yaitu integrasi ekonomi tanpa melalui *customs union*. Hal ini, dimaksudkan untuk mempercepat proses integrasi menuju penyatuan ekonomi ASEAN 2015, juga dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dan tantangan yang ada (Arifin, 2008).



**Gambar 1. Bagan tahapan integrasi balassa dan tahapan ASEAN menuju MEA**

Sumber: Samsul Arifin et al, 2008.

Dengan melihat gambar 1 tersebut, sebagai forum regional yang awalnya bertujuan untuk kepentingan politik, ASEAN mulai memberi perhatian pada kerja sama ekonomi pada akhir 1970-an yang ditandai dengan penandatanganan *Preferential Trading Arrangement* (PTA) pada 1977. Penandatanganan PTA ini menandai dimulainya proses liberalisasi dan integrasi ekonomi secara formal di forum ASEAN. Selanjutnya untuk mempercepat proses integrasi ekonomi, ASEAN membentuk *ASEAN Free Trade Area* pada 1992, yang diikuti dengan pembentukan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada 1995 dan *ASEAN Investment Area* (AIA) pada 1998 (Arifin, 2008).

Tujuan kerjasama MEA menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang dilakukan dengan meniadakan hambatan pergerakan komoditas dan faktor produksi serta melalui harmonisasi kebijakan diantara negara anggota ASEAN untuk memastikan adanya aliran bebas dipasar barang, jasa, modal dan tenaga kerja di ASEAN.

##### **5. Kesiapan Indonesia menuju MEA 2015**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia termasuk Negara heterogen dengan berbagai jenis suku, bahasa, dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. MEA 2015 dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian ASEAN menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya dinilai lebih maju.

Selain itu juga, langkah itu juga diharapkan dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional. Kita berharap terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor. Nantinya juga diharapkan saling melengkapi di antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sektor ekonomi di negara-negara ASEAN ini. Misalnya, infrastruktur. Jika kita berbicara tentang infrastruktur, mungkin Indonesia masih sangat dinilai kurang, baik itu berupa jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita dapat memperoleh manfaat dari saling tukar pengalaman dengan anggota ASEAN lainnya. Jika dilihat dari sisi demografi sumber daya manusia (SDM), Indonesia dalam menghadapi MEA ini sebenarnya merupakan salah satu negara yang produktif. Bila dilihat dari faktor usia, sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 70%-nya merupakan usia produktif. Jika kita lihat pada sisi ketenagakerjaan, kita memiliki 110 juta tenaga kerja ( BPS, 2013).

Indonesia diprediksi akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, apalagi dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar, maka akan sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan hal tersebut. Persiapan Indonesia dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai masalah pada bidang ekonomi, baik itu masalah dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri, Indonesia telah berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi Kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah lalu mengurangi kesenjangan antara pengusaha besar dengan usaha kecil dan

menengah (UKM) dan peningkatan dalam beberapa sector yang mungkin masih harus didorong untuk meningkatkan daya saing.

Masyarakat ASEAN 2015 adalah warga ASEAN yang cukup sandang pangan, cukup lapangan pekerjaan, pengangguran kecil tingkat kemiskinan berkurang melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang konkret. Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini terus berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia itu sendiri makmur dan berkecukupan sebelum memasuki AEC kelak (Majalah Industri, 2013).

Pada awalnya, Komunitas ASEAN akan diwujudkan pada 2020, tetapi akhirnya dipercepat menjadi 2015. MEA sebenarnya merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan maupun dunia. Dengan semakin bebasnya barang, jasa, modal, dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat ini.

Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi semua negara. Skema MEA 2015 tentang ketenagakerjaan, misalnya, memberlakukan liberalisasi tenaga kerja profesional papan atas, seperti dokter, insinyur, akuntan, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja kasar yang merupakan “kekuatan” Indonesia tidak termasuk dalam program liberalisasi ini. Justru tenaga kerja informal yang selama ini merupakan sumber devisa nonmigas yang cukup potensial bagi Indonesia, cenderung dibatasi

pergerakannya di era MEA 2015. Ada tiga indikator untuk meraba posisi Indonesia dalam MEA 2015. Pertama, pangsa ekspor Indonesia ke negara-negara utama ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina cukup besar. Dua indikator lainnya bisa menjadi penghambat, yaitu menurut penilaian beberapa institusi keuangan Internasional-daya saing ekonomi Indonesia jauh lebih rendah ketimbang Singapura, Malaysia, dan Thailand (Arifin, 2008).

Percepatan investasi di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Namun, kekayaan sumber alam Indonesia yang tidak ada duanya di kawasan, ini merupakan keuntungan (*local-advantage*) yang tetap menjadi daya tarik kuat, di samping jumlah penduduknya terbesar yang dapat menyediakan tenaga kerja murah. Setelah krisis ekonomi 1998 yang belum juga hilang dari Bumi Pertiwi masih berdampak pada rendahnya pertumbuhan investasi baru, semakin merosotnya kepercayaan dunia usaha, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional Hal tersebut disebabkan buruknya infrastruktur ekonomi, instabilitas makroekonomi, ketidakpastian hukum dan kebijakan, ekonomi biaya tinggi dan lain-lain. Pemerintah tidak bisa menunda lagi untuk segera berbenah diri, jika tidak ingin menjadi sekedar pelengkap di MEA 2015. Keberhasilan tersebut harus didukung oleh komponen-komponen lain di dalam negeri. Masyarakat bisnis Indonesia diharapkan mengikuti gerak dan irama kegiatan diplomasi dan memanfaatkan peluang yang sudah terbentuk ini.

Diplomasi Indonesia tidak mungkin harus menunggu kesiapan di dalam negeri. Peluang yang sudah terbuka ini, kalau tidak segera dimanfaatkan, kita akan tertinggal, karena proses ini juga diikuti gerak negara lain dan hal itu terus bergulir. Kita harus segera berbenah diri untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan berkualitas global.

Tantangan Indonesia ke depan adalah mewujudkan perubahan yang berarti bagi kehidupan keseharian masyarakatnya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia kita ini bisa membantu untuk mewujudkan kehidupan ekonomi dan sosial yang layak agar kita bisa segera mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

#### **6. MEA 2015 Sudut Pandang pengusaha**

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, MEA bisa menjadi ancaman bagi Indonesia ketika masih ada sektor-sektor tertentu yang belum siap bersaing dengan negara lain. Sofjan mencontohkan, agrikultur Indonesia masih kalah saing dengan Thailand (Majalah industri, 2013).

Di bidang *service industry* Singapura lebih unggul dari Indonesia. MEA akan dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia bila semua pihak terkait bisa mempersiapkan diri secara matang sehingga nantinya bisa menghadapi persaingan yang pastinya tidak mudah. Seberapa jauh persiapan dalam dua tahun ini sehingga kita bisa diuntungkan oleh adanya MEA. Pemerintah harus

bisa membenahi sejumlah hal utama seperti *high cost economy* dan kondisi infrastruktur, demi kepentingan nasional.

Ekspor Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada kekayaan alam. Sehingga Indonesia tidak bisa menghadapi gejolak harga dunia yang terjadi di sektor itu. Terkait perdagangan jasa secara kasat mata pesaing terberat dari Indonesia adalah Singapura dan Malaysia. Sedangkan untuk sektor logistik, wisata dan jasa Indonesia, jika dilihat neraca perdagangan Indonesia dengan semua negara ASEAN, saat ini hanya mengalami defisit dengan Thailand. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama kuartal pertama tahun 2013, nilai perdagangan antara Indonesia dengan sembilan negara ASEAN selain Thailand adalah US\$ 15,7 miliar. Dari jumlah itu, sebesar US\$ 7,63 miliar adalah impor dan US\$ 8,07 miliar adalah ekspor. Sedangkan dengan Thailand, nilai ekspor nonmigas Indonesia adalah US\$ 1,37 miliar. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan impor yang sebesar US\$ 2,76 miliar (BPS, 2013).

Di sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus segera mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) karena berhubungan dengan MEA. DNI terutama di sektor distribusi, retail, dan *service industry* harus dipegang oleh pengusaha nasional dan jangan diserahkan ke pihak asing. Peralunya, kata dia, industri manufaktur telah dikuasai oleh asing, baik dari segi modal maupun teknologi. Sehingga, apabila ada pihak asing yang masuk dalam DNI, maka harus melakukan *join venture* dengan perusahaan lokal. “Tidak bisa kita biarkan semuanya dipegang oleh asing.

Menurut Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung Muhammad Kadafi optimistis organisasi yang dipimpinnya ke depan lebih berkembang dan maju. Peralunya saat ini, Hipmi banyak diisi orang-orang yang memiliki potensi dan integritas. “Dalam visi-misinya HIPMI basis pengembangan pengusaha muda yang produktif dan

berdaya saing global guna mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015. Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi kunci utama adalah meningkatkan kompetensi dari para anggota. Terkait permintaan peningkatan level usaha, HIPMI akan berupaya mengembangkan jiwa entrepreneur para anggota HIPMI sehingga lebih pintar menghadapi peluang (Radar Lampung, 2014).

Dari segi pangan, Lampung juga memiliki potensi besar. keberadaan pelabuhan baru nanti, ekspor hasil bumi seperti kopi, lada, gula dan sebagainya akan lebih mudah. Tahun yang akan datang di rencanakan akan ada jalan tol Trans Sumatera bahkan ada rencana pembangunan jalur kereta api, sehingga dapat memangkas biaya.

Tahap selanjutnya adalah bagaimana Lampung bisa menghadapi kendala-kendala dan tantangan ke depan yang akan terus berubah. Kendala dan permasalahan selama ini di evaluasi, nantinya kita akan terjun ke daerah-daerah sehingga kita tahu apa permasalahannya. Kita akan bermitra dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan program-program yang ada, karena tanpa sinergis dengan pemerintah ibarat berlari tanpa tujuan.

## **B. Tinjauan tentang Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan**

### **1. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).

## **2. Sikap**

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat menafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup, sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial (Notoatmodjo, 2007).

Komponen pokok sikap :

1. Kepercayaan atau keyakinan berasal dari apa yang telah dilihat atau diketahui tentang objek sikap tersebut. Mann menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki oleh individu mengenai objek atau sesuatu. Pengalaman pribadi dan informasi dari individu lain merupakan determinan utama dalam pembentukan kepercayaan tentang bagaimana individu mempersepsi terhadap objek sikap (Azwar, 2009).
2. Tanggapan/perasaan merupakan Komponen yang menyangkut tentang masalah emosional dan penilaian individu. Perasaan-perasaan individu terhadap suatu objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek ini berpengaruh dalam merubah sikap individu. Pada umumnya tanggapan/

perasaan individu terhadap suatu objek telah banyak ditentukan oleh suatu kepercayaan. Jadi bila individu cenderung percaya pada suatu objek maka ia akan melakukan tanggapan/ perasaan dengan bersikap positif maupun negative terhadap objek tersebut (Azwar, 2009).

3. Kecenderungan untuk bertindak merupakan Komponen yang menunjukkan intensitas dari sikap dalam arti seberapa besar individu akan cenderung bertindak terhadap objek sikap. kecenderungan potensial untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki suatu respon Pada dasarnya komponen ini meliputi bentuk-bentuk perilaku yang akan dilakukan berupa pernyataan yang diucapkan individu (Walgito, 2001).

Secara teoretis, interaksi ketiga komponen tersebut akan berjalan selaras dan konsisten dalam membentuk sikap terhadap suatu objek. Ketiganya harus mempunyai pola yang seragam dalam membentuk suatu sikap. Bila salah satu dari ketiga komponen itu tidak konsisten dengan komponen yang lain, maka akan menyebabkan ketidakselarasan dan akan menimbulkan mekanisme perubahan sikap sedemikian rupa sehingga konsistensi itu tercapai kembali (Azwar, 2009).

### **3. Tindakan**

Menurut Skinner dalam (Notoatmodjo, 2007) merumuskan bahwa tindakan merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, tindakan ini terjadi melalui proses adanya stimulus

terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus– Organisme-Respon.

Adapun Faktor faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menurut Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2007), antara lain

- 1) Faktor predisposisi (predisposing factor), yaitu factor yang mempermudah terjadinya tindakan seseorang diantaranya: pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.
- 2) Faktor pendukung (enabling factor), yaitu faktor yang mendukung tindakan terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana antara lain umur, status sosial ekonomi, pendidikan, prasarana dan sarana serta sumber daya.
- 3) Faktor pendorong (reinforcing factor) faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya tindakan.

### **C. Teori Behavioral Sosiologi**

Teori behavioral sosiologi di bangun dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi prilaku ke dalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi didalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Akibat-akibat dari tingkah laku di berlakukan sebagai variabel independen. Ini berarti bahwa teori ini berusaha menerangkan tingkah laku yang terjadi itu melaui akibat-akibat yang timbul kemudian. Jadi nyata secara metafisik ia mencoba menerangkan tingkah laku yang terjadi di masa sekarang melalui kemungkinan akibatnya yang terjadi di masa yang akan datang. Menarik perhatian dari teori behavioral ini adalah hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor terhadap tingkah laku dengan tingkah laku yang terjadi sekarang. Akibat tingkah laku di masa yang lalu akan mempengaruhi tingkah laku yang terjadi di masa sekarang. Dengan mengetahui apa yang di peroleh dari suatu tingkah laku nyata di masa lalu akan dapat diramalkan apakah seseorang aktor akan bertingkah laku yang sama (mengulangi) dalam situasi sekarang (Umiarso, 2004)

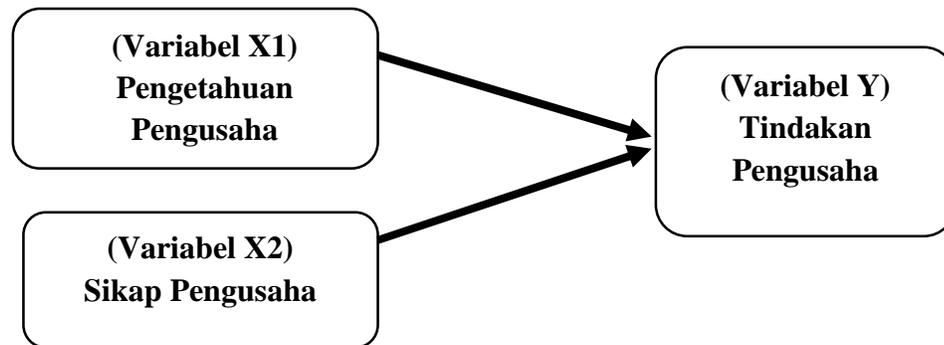
Jadi dalam teori ini mengukur dengan adanya stimulus maka akan menimbulkan respon dari aktor. Dalam penelitian ini pengetahuan dan sikap pengusaha sebagai stimulus kemudian akan menimbulkan respon tindakan pengusaha dalam menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN.

#### **D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesa Penelitian**

##### **1. Kerangka Pemikiran**

Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran berisi: (1) Alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoretik dan atau hasil penelitian yang relevan. (2) Kerangka logika (*logical construct*) yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. (3) Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian atau merupakan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model. Sehingga pada akhir kerangka pemikiran ini terbentuklah hipotesis.

Dengan demikian, uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoretis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkannya fenomena atau masalah yang diteliti. kerangka pemikiran yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2. Bagan kerangka pemikiran**

## 2. Hipotesa Penelitian

Sugiyono (2012) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas maka dapat diperoleh suatu hipotesis yaitu:

### 1. Tingkat Pengetahuan Pengusaha

Ha : Ada hubungan tingkat pengetahuan terhadap tindakan pengusaha dalam menghadapi MEA 2015

Ho : Tidak ada hubungan tingkat pengetahuan terhadap tindakan pengusaha dalam menghadapi MEA 2015

### 2. Sikap Pengusaha

Ha : Ada hubungan sikap terhadap tindakan pengusaha dalam menghadapi MEA 2015

Ho : Tidak ada hubungan sikap terhadap tindakan pengusaha dalam menghadapi MEA 2015